

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aartje Tehupeiory, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI PRESS, Jakarta, 2021.
- Aartje Tehupeiory, *Pengakuan & Perlindungan hak – hak masyarakat adat*, UKI PRESS, Jakarta, 2021.
- Aarce Tehupeiory, *Asas – Asas Hukum Agraria*, UKI PRESS, Jakarta, 2023.
- Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Boedi Harsono, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara, 1985.
- H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Jawa Timur, Qiara Media, 2021.
- I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008.
- Ifrani, H.F.A.Abby, Abdul Halim Barkatullah, *Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan*, Nusa Media, Bandung, 2022.
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jilid 1, Universitas Trisakti, Jakarta, 2006.
- Lili Rasjidi dan Ira Tahanian, *Dasar - Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti., Bandung, 2004.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mangisi Simanjuntak, *Filsafat Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019.
- Maria Sumadjono, *kebijakan Pertanahan: antara regulasi dan implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005.

- Maria. S. W. Sumardjono Dalam H. Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UI Pres, 2004.
- Muhamad Sadi Is, Khalisah Hayatuddin, dan Suharyono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Kencana, Jakarta, 2022.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Reko Dwi Salfutra, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rudi Indrajaya, *Pengantar Hukum Agraria Teori Dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Rudy, Rudy Wijaya, Muhammad Amin Putra, *Rekognisi Hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri Jaya Lesmana, *Hukum Adat Indonesia*, Tangerang, Bidara Cendeka Ilmi Nusantara, 2020,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

## **B. Peraturan Perundang – Undangan dan Konvensi**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986

### C. Jurnal dan Lain – lain

Abdurrahman, “*Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*”, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BHPN, Kementrian Hukum dan HAM R.I, Jakarta 2015

Achmad, I. A., Risdiwanto, G., & Rezandy, J. G., *Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung. Soumatera Law Review*, 3 (1), 81-92,2020, available from <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5102>. (diakses diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 22.38 wib)

Ahmad Heru Romadhon, dkk, “*Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.2, Desember 2018.

Andi Wahyuddin Nur, Dewi Wahyuni Mustafa, M. Asraf Fradama, Asriani Said, Rina Febrianti, *Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila, Compile Journal of Society Service*, Vol.2No.1, 2024.

Debrina Rahmawati, 2018, "Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 12 Nomor .2.

Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*

Hendri Jayadi, Tomson Situmeang, Poltak Siringoringo, I Dewa Ayu Widyani, L Elly AM Pandiangan, , Putu George Matthew Simbolon, *Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jurnal ComunitÃ Servizio, vol.5, No. 1, 2023.

Hetharie, Y., *Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2019, SASI, 25(1), 27-36, available from DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>. (diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 22.10 WIB)

Indah Sari, “*Hak – hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA)*”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 9, No.1, 2017.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012.

Satria Paris Heremba, *'Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Distrik Ngguti Kabupaten Merauke Papua'*, Universitas Hasanuddin, 2023 available from [http://repository.unhas.ac.id/26045/2/E012191019\\_tesis\\_03\\_01\\_2023\\_BAB\\_1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/26045/2/E012191019_tesis_03_01_2023_BAB_1-2.pdf), (diakses pada 30 Desember 2024 pukul 16.44).

Syukri Batubara, *"Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy: Study Mengenai Pelaksanaan Perda No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Tanah Baduy"*.

Tata Wijayanta, 2014, *"Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 Nomor. 2.

Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, 019.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45951/lindungi-hutan-dan-masyarakat-adat-cabut-izin-pt-permata-nusa-mandiri/> (diakses 15 Juni 2024, pukul 14.00 WIB)

<https://jubi.id/tanah-papua/2022/masyarakat-adat-datangi-kantor-bupati-jayapura-minta-izin-lokasi-pt-permata-nusa-mandiri-dicabut/> (diakses 15 Juni 2024, pukul 14.32 WIB)

<https://www.greenpeace.org/indonesia/grime-nawa-surga-indonesia-yang-perlahan-hilang/> (diakses 30 Desember 2024, pukul 15.00 WIB)

<https://www.mongabay.co.id/2022/07/24/ramai-ramai-desak-pemerintah-cabut-izin-pt-permata-nusa-mandiri-di-lembah-grime-nawa/> (diakses 17 Januari 2025, pukul 21.00 WIB)

<https://terajufoundation.org/pernyataan-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-keadilan-sosial-dan-keberlanjutan-lingkungan-di-tanah-papua/> (diakses 17 Januari 2025, pukul 21.17 WIB)